

Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Kompetensi Warga Negara¹

Samsuri²

Abstract

Civic education as a subject matter has to develop civic competencies such as knowledge, disposition, and skills in order to develop good citizen. Its goal of civic education. One of effort to realize that goal is develop model of learning. Its very important because model of learning has to stimulate for student to active, creative and innovative in order to not emphasize interest that formally and rigid.

Keyword: Civic Education, Civic Knowledge, Civic Skills and Civic Disposition.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran di persekolahan harus mengembangkan kompetensi-kompetensi warga negara; baik knowledge, skills, dan disposition agar dapat menciptakan "good citizen" sebagaimana tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan men gembangkan model pembelajaran PKn yang efektif, kreatif dan inovatif agar model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak lagi menonjolkan kepentingan-kepentingan tertentu yang bersifat kaku dan formal.

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pengetahuan Warga negara, Keterampilan Warga Negara dan Watak Warga Negara.

Pendahuluan

Seorang sosiolog ternama, Ralf Dahrendorf (dinukil dari Gillborn, 1992: 57), dalam satu kesempatan menyebutkan bahwa "*Citizenship ... is a very hard concept; not one of moral exhortation, but one of the realities of people's lives.*" Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan, jika mengingat betapa kajian pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik memiliki kerumitan tersendiri. *Pertama*, selain kajian pendidikan kewarganegaraan selalu bersentuhan dengan kepentingan politik kenegaraan, juga karena sentuhan itu menjadikan pendidikan kewarganegaraan selalu rentan untuk

dimanfaatkan sebagai alat mempertahankan kepentingan kekuasaan suatu rejim politik.

Kedua, "kerasnya" konsep kajian kewarganegaraan karena dimensi-dimensi kajiannya tidak cukup semata-mata mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik di dalam sistem kehidupan bernegara (dimensi politik). Namun, atribut "baik" dari seorang warga negara juga berarti mengandaikan perlunya wilayah kajian etika (filsafat moral) kenegaraan agar atribut "baik" tersebut tercapai.

Ketiga, kajian pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan hak-hak dan kewajiban warga negara terhadap negara (urusan publik). Namun, pendidikan kewarganegaraan perlu

¹ Bahan kajian Kuliah Umum di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 9 Mei 2011. Bagian dalam makalah ini tentang *best practices* pembelajaran PKn, pernah disajikan penulis dalam kajian mandiri kewarganegaraan di Program Studi PIPS Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Semester Genap 2008/2009.

² Dosen tetap di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan EKonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. e-mail: samsuri1998@yahoo.com, HP. 08562890412, 081805950338